



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JLN. BURHANUDIN PUTIH, BUKIK LIMAU KM 10 SARILAMAK KODE POS 26271
Telp dan Fax.(0752)7750391

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan personil Pejabat PPTK dan Asisten PPTK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota .
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan penetapannya dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01) ;
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014) ;
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai :
- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

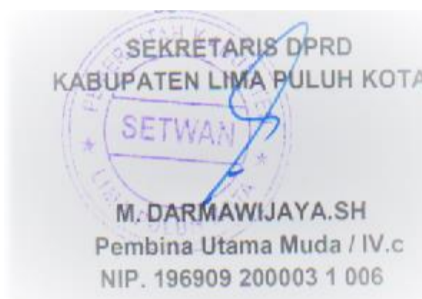
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : Januari 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL : Januari 2021
TENTANG : **PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Hendri Jasmar.SH	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					2	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
			5	Layanan Administrasi DPRD	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
					2	Fasilitasi Fraksi DPRD
					3	Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Husni.S.Sos	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan PD
					2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA
					3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA
					4	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA
					5	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA
					6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
					7	Evaluasi kinerja PD
					2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah

					2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
					4	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
					5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					6	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyelenggaraan Rapat-rapat , kordinasi dan konsultasi SKPD
			4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Salman.ST	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
			2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
					2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
			4	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
					2	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
			5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
					2	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
					3	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

			6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD
			7	Layanan Administrasi DPRD	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Suheryanto.S.Sos	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	2	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi Tugas DPRD	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
			2	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	Penyusunan Program Kerja DPRD
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
			1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
					2	Pembahasan rancangan peraturan daerah
					3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
					4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan/ dan/atau Naskah Akademik
					5	Penyusunan Tata Tertib DPRD
			2	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
					2	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			3	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Penyusunan Kode Etik DPRD
					2	Pengawasan Kode Etik DPRD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Amirunas.S.Sos	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Fasilitasi Keprotokolan
					2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
					3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan

	2	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	Bimbingan Teknis DPRD
					2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
					3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
			4	Pembahasan Kerjasama Daerah	1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
					2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
			5	Fasilitasi Tugas DPRD	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
					2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Adriwan Frima Putra.S.IP	1	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
					2	Reses
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Yahya.S.AP	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	2	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	Pembahasan KUA dan PPAS
					2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					3	Pembahasan APBD
					4	Pembahasan APBD Perubahan
					5	Pembahasan Laporan Semester
					6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Nama PPTK	No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Uraian Sub Kegiatan
Fadly Sutrisno.Amd	1	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi Tugas DPRD	1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

			2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
					2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
					3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
					4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
					5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
					6	Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh badan Pemeriksaan Keuangan
					7	Pengawasan Penggunaan Anggaran
					8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Sarilamak, Januari 2021

